

Pemberdayaan dan Kesetaraan Perempuan

Pengalaman di berbagai negara sedang berkembang, seperti Bangladesh, Haiti, termasuk pula Indonesia yang merupakan pembangunan kapitalistik acapkali membuktikan bahwa kaum perempuan seringkali terpojok dalam posisi lemah. Mereka tereksplorasi dan tidak memiliki bargaining power yang kuat terhadap kelas sosial di atasnya akibat proses modernisasi dan industrialisasi. Namun kini hampir seluruh negara telah menyadari bahwa pembangunan manusia tidak akan bisa dicapai tanpa pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Bagong Suyanto

Dosen FISIP Unair

Emy Susanti Hendraro

Peneliti PSW Unair



Bagong Suyanto, lahir di Kertosono, 6 September 1966. Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Peneliti pada Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga dan Pussekomp Paramawidya Surabaya. Menulis beberapa buku tentang perempuan dan kemiskinan.

Emy Susanti Hendraro lahir di Pacitan, 15 Maret 1958. Lulus dari Flinders University of South Australia (1994) dan pernah mengikuti Post Graduate Training on Women and Development, di Leiden, Belanda (1987).

Kerisauan terhadap keamanan struktur sosial-ekonomi yang dinilai tidak adil dan menindas kaum perempuan, serta terjadinya *bias gender* dalam proses pembangunan sebenarnya telah dilontarkan banyak kalangan.¹ Kendati ekspansi modal dalam proses industrialisasi di berbagai negara diakui telah makin membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik yang menghasilkan uang, tetapi, akibat proses industrialisasi yang berkembang cenderung bercorak kapitalistik; sesungguhnya telah terjadi proses eksploitasi, subordinasi, dan marginalisasi posisi kaum perempuan.

Di dalam sistem kapitalistik, kaum perempuan cenderung berada di dalam posisi sebagai obyek sistem eksploitasi tiga lapis. *Pentama*, pada tingkat global sebagai mayoritas warga masyarakat negara pinggiran, kaum perempuan akan menjadi korban kesenjangan dan ketidakadilan sistem inter-

1. Lihat misalnya: Sen G. & C. Grown, *Development, Crisis, and Alternative Visions: Third World Women's Perspectives* (New York: Monthly Review Press, 1987); N. Heyser, *Working Women in South-East Asia: Development, Subordination and Emancipation* (Philadelphia: Open University Press, 1986).

nasional. *Kedua*, pada tingkat produksi, sebagai bagian terbesar lapisan bawah dari sistem stratifikasi kerja industrial, kaum perempuan akan menjadi korban pertama dari kesenjangan hubungan-hubungan industri kapitalis. *Ketiga*, pada tingkat kemasyarakatan, kaum perempuan juga harus mengalami perlakuan yang tidak adil dari struktur dan ideologi *gender* yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.²

Pengalaman di berbagai negara Sedang Berkembang, seperti Bangladesh, Haiti, termasuk pula Indonesia yang menerapkan model pembangunan kapitalistik — dengan logika utama selalu berusaha memaksimalisasi produksi — acap kali membuktikan bahwa kaum perempuan seringkali terpojok dalam posisi paling lemah, tereksploitasi dan tidak memiliki *bargaining power* yang kuat terhadap kelas sosial di atasnya akibat proses modernisasi dan industrialisasi.

Hampir seluruh negara kini telah menyadari bahwa pembangunan manusia tidak akan bisa dicapai tanpa pemberdayaan dan kesetaraan *gender*. Menghela ekspor dan memacu pertumbuhan ekonomi bukan tidak diperlukan, namun dalam proses pembangunan yang utuh juga harus dipikirkan bagaimana memperluas pilihan yang ada bagi perempuan. Kegiatan dan program pembangunan yang semata hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi dan tidak memiliki visi *gender*, niscaya akan beresiko timbulnya pemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pemberdayaan Perempuan

Di Indonesia, dengan keberadaannya yang secara absolut lebih besar daripada penduduk laki-laki, perempuan bukanlah beban pembangunan, melainkan justru merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran proses pembangunan. Caranya: sudah tentu bukan dengan membiarkan perempuan tetap terpuruk di dalam kubangan kemiskinan dan kelemahan-

nya, tetapi sesegera mungkin harus dilakukan upaya pemberdayaan agar perempuan dapat duduk sejajar dengan laki-laki mengisi kegiatan pembangunan.

Menurut Moser, bahwa inti strategi pemberdayaan (*empowerment*) sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul daripada kaum pria. Pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sekadar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.³

Yang diperjuangkan dalam upaya memberdayakan perempuan adalah pemenuhan hak mereka menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting. Pendekatan pemberdayaan sekali lagi tidak menekankan pentingnya peningkatan status perempuan secara relatif terhadap kaum pria, tetapi berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat.

Kenapa kegiatan pembangunan di Indonesia harus seiring dengan proses pemberdayaan perempuan? Paling tidak ada dua alasan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, karena perempuan sesungguhnya memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga, dan sekaligus merupakan sumber daya ekonomi yang tak kalah penting dibandingkan dengan pria. Keberadaan perempuan dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai pelengkap fungsi reproduksi saja, namun lebih dari itu banyak penelitian membuktikan bahwa perempuan ternyata acap kali memberikan sumbangan yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga serta masyarakat.⁴

2. Lihat, Diane Elson and Ruth Pearson, "The Subordination of Women and the Internationalization of Factory Production," dalam Kate Young dkk., (ed.), *Of Marriage and the Market* (London: Routledge & Kegan Paul, 1984); Brigitte Holzner, *Perempuan dan Pembangunan: Kebijakan-kebijakan* (draft, 1992).

3. Caroline O.N. Moser, *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training* (London: Routledge, 1993).

4. Lihat, Kodiran dan Bambang Hidayana, *Peranan Wanita Dalam Sawah Surjan* (Yogyakarta: PPK UGM,

Kedua, karena selama ini keterlibatan atau tingkat partisipasi kerja perempuan (TPAK) pada umumnya masih sangat rendah, sehingga ada kesan perempuan justru menjadi beban pembangunan. Kendati menurut hasil Sensus, TPAK perempuan selama kurun waktu tahun 1980-1990 sudah meningkat dari 32,4% menjadi 38,8%, namun bila dibandingkan dengan TPAK pria pada umumnya masih jauh ketinggalan. Hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990 memperlihatkan jika TPAK pria telah mencapai 67,1% dan 71,1% pada masing-masing periode tersebut, maka TPAK perempuan tercatat hanya 32,4% dan 38,8% pada periode yang sama. Ini berarti jumlah tenaga kerja perempuan yang terlibat dalam pasar kerja hanya sekitar separuh dari jumlah pria.⁵

Sebagian besar perempuan sampai kini cenderung lebih banyak berkutat di sektor domestik —melaksanakan tugas rumah tangga yang *notabene* tidak menghasilkan uang. Meskipun harus diakui bahwa kesediaan perempuan melaksanakan tugas domestik mengasuh anak, memasak, dan sebagainya itu sebenarnya juga berfungsi positif memberi kesempatan bagi pria untuk dapat terlibat dalam sektor publik, namun, tetap saja hal itu bersifat *counter productive* karena seolah menelikung hak-hak perempuan yang ingin mengekspresikan kemampuan atau potensinya.

Dengan memilih kebijakan yang ingin memberdayakan perempuan, pemerintah tidak semata hanya bermaksud ingin meningkatkan posisi *bargaining* kaum perempuan di hadapan suami atau kaum pria. Namun, lebih dari itu adalah untuk menggali potensi dan sekaligus memberi kesempatan kepada perempuan agar dapat terlibat secara aktif di dalam fungsinya memperkuat penyangga ekonomi rumah tangga. Bagaimana pun jauh lebih baik memberi kesempatan perempuan mengaktualisasikan potensinya daripada

membiarkan mereka tetap hanya berkutat di sektor domestik yang tidak secara langsung menghasilkan uang.

Berbagai Kendala

Bersamaan dengan proses industrialisasi dan makin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, maka makin terbuka peluang serta makin banyak pula perempuan yang memasuki ranah-ranah publik. Menurut proyeksi BPS, diperkirakan pada tahun 1998 nanti TPAK perempuan akan terus meningkat hingga 40,2% atau kurang-lebih hampir sejajar dengan TPAK pria (lihat Tabel 1).

Lepas dari indikator yang digunakan BPS, kita tentu berharap dan juga gembira bila TPAK perempuan dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Hanya saja, sejauh mana proyeksi itu dapat terwujud tentu masih perlu didukung oleh kebijakan pembangunan yang berwawasan *gender* dan iklim yang memang benar-benar kondusif bagi maraknya upaya pemberdayaan perempuan.

TABEL 1. Proyeksi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 1988-1998 (dalam Persen)

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1988	37,4	62,6	100
1993	38,8	61,2	100
1998	40,2	59,8	100

Sumber: BPS, Proyeksi Angkatan Kerja 1988-2000

Selama ini berbagai upaya untuk memberdayakan perempuan pada umumnya masih menemui berbagai kendala yang tidak ringan. Harus diakui dalam masyarakat masih ditemui nilai-nilai sosial-budaya yang pada umumnya kurang mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Citra baku dari masyarakat terhadap perempuan masih didominasi pola-pola lama, sehingga pria cenderung memperoleh kesempatan lebih besar, sedangkan perempuan hanya dicadangkan pada urusan tradisional semata.⁶ Kendala inilah yang sedikit-banyak menghambat pe-

1990); Ken Suratnyah dkk., *Pembangunan Pertanian dan Peranan Wanita di Pedesaan Yogyakarta dan Bali* (Yogyakarta: PPK UGM, 1991).

5. Partini, "Pekerja Perempuan Sektor Industri: Antara Harapan dan Kenyataan," dalam Budi Susanto dkk. (ed.), *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)* (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1992), hal. 57.

6. Lihat, Sheila Allen and Carrol Wolkowitz, *Home Working, Myths and Realities* (Houndmills: Macmillan Education, 1987).

luang, kemampuan dan kemandirian wanita untuk beraktualisasi diri.

Di Indonesia, berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan acapkali juga menjadi sumber penghambat kemajuan perempuan. Banyak pihak mengakui bahwa pembangunan di satu sisi memang memungkinkan munculnya peningkatan agregat dalam aspek sosial-ekonomi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berbagai kasus membuktikan bahwa kegiatan pembangunan ternyata acapkali menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi sejumlah besar perempuan — terutama yang berasal dari kalangan masyarakat miskin dan tinggal di daerah pedesaan.⁷

Contoh klasik yang sering dikemukakan adalah tersingkirnya pekerja perempuan dari sektor pertanian sebagai konsekuensi penetrasi teknologi baru. Studi Collier (1976), misalnya, menemukan bahwa petani kaya dan tuan tanah yang menggunakan bibit varietas unggul menggunakan sistem tebasan dalam panen sehingga buruh perempuan yang biasanya menjadi pemetik jumlahnya makin berkurang. Kaum perempuan secara perlahan-lahan tersingkir dari sistem pertanian.⁸ Jika dahulu dalam sektor pertanian subsistem peran-peran perempuan meliputi otoritas dan pengambilan keputusan karena keterlibatannya yang menyeluruh dalam pekerjaan pertanian, kini peran itu tidak bisa lagi muncul. Akses terhadap informasi, kredit dan teknologi serta birokrasi hanya jatuh pada Kepala Keluarga laki-laki: tidak untuk kaum perempuan.

Diakuf atau tidak, di lingkungan tempat kerja seringkali perempuan masih dianggap sebagai tenaga kerja nomor dua (sekunder). Di samping itu, masih sering pula terjadi di berbagai sektor pekerjaan, upah tenaga kerja perempuan diperlakukan diskriminatif dan tidak sebanding dengan resiko serta beban

pekerjaannya.⁹ Data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1990 memperlihatkan bahwa sebesar 61,21 persen dari 6,621 juta pekerja perempuan menerima pendapatan kurang dari Rp. 50.000 sebulan. Sementara itu, untuk tenaga kerja pria yang memperoleh upah yang sama tercatat hanya 24,83 persen.

Studi Kodiran dan Hidayana (1990) menemukan bahwa di sektor pertanian perbedaan besar upah antara buruh tani perempuan dan pria didasarkan pada kekuatan otot atau tenaga yang dinilai tidak sama: masing-masing menghasilkan produktivitas per jam kerja yang berlainan. Studi kedua pakar tersebut di salah satu desa di Yogyakarta menemukan bahwa kaum pria dianggap mempunyai kekuatan dua kali lipat daripada perempuan, sehingga upah buruh perempuan cuma separo dari upah buruh pria.¹⁰

Di sektor industri, kondisinya kurang lebih sama. Upaya untuk lebih banyak mempekerjakan tenaga buruh perempuan daripada buruh laki-laki adalah salah satu strategi pengusaha untuk menekan biaya produksi. Tenaga kerja perempuan, selain dinilai lebih rajin, juga karena pengusaha bisa memberi upah lebih rendah. Penelitian Mather (1982) di Tangerang, menunjukkan banyak perusahaan mencari tenaga kerja perempuan yang berumur antara 13—20 tahun karena upahnya lebih murah.¹¹

Pihak pengusaha sendiri sebenarnya bukan tanpa alasan memperlakukan diskriminasi upah kepada buruh perempuan. Mereka biasanya beralih, pemberian upah yang berbeda itu dilakukan karena tenaga kerja perempuan memang layak memperoleh perlakuan seperti itu. Dalam hal ini, ada dua alasan yang biasanya dijadikan dasar pembenaran, yakni: *pertama*, karena secara fisik perempuan dianggap lebih lemah daripada pria. *Kedua*, karena acapkali "tanggung

7. Lihat, Ester Boserup, *Women's Role in Economic Development* (New York: St. Martin's Press, 1970); Bagong Suyanto, *Penyerapan Tenaga Kerja dan Diskriminasi Upah Buruh Wanita di Sektor Perkebunan* (Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1995).

8. Lihat, Soetandyo Wignjosebroto dkk., *Wanita dan Pasar Tradisional*, (Surabaya: Pussekomp Paramawidya, 1993).

9. Benyamin White, *Pengaruh Pria dan Wanita Dalam Kegiatan Rumah Tangga dan Dalam Masyarakat di Dua Desa di Jawa Barat*, (Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, 1980).

10. Kodiran dan Hidayana, *op.cit.*

11. Lihat, Sutinah dan Bagong Suyanto, "Upaya dan Kendala Pemberdayaan Wanita," Makalah Seminar Konggres ISI II di Ujungpandang, 1995.

jawab sosial" yang dilimpahkan kepada perempuan mengakibatkan kelompok ini sering berpindah pekerjaan dan memiliki absensi yang relatif cukup tinggi.

Dalam sistem kapitalistik, sikap pengusaha yang memberi upah rendah kepada tenaga kerja perempuan itu wajar dan sah saja dilakukan karena mereka memang cenderung menekan biaya produksi. Tetapi, bagaimana pun harus diakui bahwa perlakuan diskriminasi yang dilakukan pengusaha sebenarnya menunjukkan masih berlakunya nilai gender yang menempatkan perempuan sebagai penghasil sekunder dari pendapatan rumah tangga secara keseluruhan — meskipun dalam kenyataan tidak jarang perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dalam kaitan ini Anker dan Hein (1985) mengemukakan bahwa rendahnya upah yang diberikan kepada perempuan adalah karena mereka pada mulanya bekerja dalam rumah tangga yang tidak dibayar atau sebagai *unpaid worker*.¹²

Triple Struggle

Banyak pakar gender dengan gamblang telah menunjukkan berbagai kontradiksi dan bias gender yang terjadi di dalam proses pembangunan. Moser (1993), misalnya, menyatakan benar peran penting perempuan dalam proses pembangunan di negara dunia ketiga secara kognitif telah dipahami dan diakui secara luas, namun dalam kenyataannya harus diakui masih banyak institusi sosial yang belum berfungsi optimal dalam mendukung proses pemberdayaan perempuan.¹³

Kerap kali terjadi di berbagai komunitas, perempuan justru mengalami subordinasi dan proses marginalisasi karena harus melaksanakan peran rangkap tiga (*triple role*). Bronstein, dalam salah satu penelitiannya menunjukkan bagaimana perempuan keluarga miskin acapkali harus hidup menderita karena "perjuangan rangkap tiga" (*triple struggle*) yang menindihnya, yakni: (1) sebagai warga negara terbelakang, (2) sebagai

petani yang tinggal di daerah sangat miskin, dan (3) sebagai perempuan yang hidup di tengah dominasi masyarakat laki-laki.¹⁴

Menurut Bronstein, pada sebagian besar masyarakat di dunia ketiga, sudah lazim terjadi apa yang disebut pembagian kerja seksual. Laki-laki umumnya ditempatkan secara tipikal dalam posisi yang dominan: sebagai pencari nafkah (*bread winner*) atau sebagai pekerja produktif dan menyandang peran sebagai penghasil pendapatan utama. Sementara itu perempuan ditempatkan pada posisi sebagai nyonya rumah (*home maker*) yang bertanggungjawab atas segala kegiatan reproduktif dan pekerjaan domestik yang terkait di dalam organisasi rumah tangga.

Sepanjang pembagian kerja seksual tersebut dilakukan atas asas saling menghormati dan menghargai peran masing-masing pihak, sebenarnya tidak menjadi masalah. Artinya, pembagian kerja gender yang berlaku dalam masyarakat tidak menyebabkan pelecehan dan diskriminasi laki-laki atas perempuan karena pekerjaan di sektor domestik dipandang lebih rendah daripada peran pencari nafkah. Tetapi, menjadi lain soalnya ketika pembagian kerja gender tersebut ternyata membawa implikasi yang berbeda ketika perempuan mulai memasuki ranah publik (*public domain*).¹⁵

Di lingkungan tempat-tempat kerja sering terjadi perempuan dianggap sebagai tenaga kerja nomor dua. Di samping itu, masih sering pula terjadi di berbagai sektor pekerjaan upah tenaga kerja perempuan diperlakukan diskriminatif dan tidak sebanding dengan resiko serta beban pekerjaannya. Perempuan dipandang sebagai tenaga kerja murah yang layak dibayar rendah karena peran mereka hanyalah sebagai pembantu suami.

Di tingkat masyarakat, kondisinya kurang lebih sama. Masyarakat seringkali memandang bahwa bila dalam keluarga yang suaminya bekerja di dunia publik lalu terjadi keretakan dalam keluarganya, maka pada

12. Richard Anker and Catherine Hein, *Sex Inequalities in Urban Employment in the Third World* (New York: St. Martin's Press, 1985).

13. Moser, *op.cit.*

14. Lihat, A. Bronstein, *The Triple Struggle* (London: War on Want, 1982).

15. Lihat, Lynne Brydon and Sylvia Chant, *Women in The Third World: Gender Issues in Rural and Urban Areas* (Aldershot: Edward Elgar, 1989).

perempuanlah segala kesalahan akan ditimpakan. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa kendati masyarakat telah makin berkembang ke arah masyarakat industri, namun pandangan umum tentang perempuan karir belum disamakan dengan pria atau masih ada *bias gender* dalam memandang dan memperlakukan perempuan.

Ada kecenderungan, setiap kali perempuan akan bekerja dan mengembangkan diri serta karirnya di dunia publik, mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumah tangga. Hal ini berarti bahwa apabila perempuan ingin mengembangkan karir atau berkulat di dunia publik, mereka dituntut untuk tetap dan selalu tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Di sini harus diakui bahwa dalam masyarakat disinyalir masih ada nilai-nilai sosial-budaya yang pada umumnya belum siap menerima pergéseran nilai perubahan sosok perempuan masa kini.

Citra baku masyarakat terhadap perempuan masih didominasi pola-pola yang lama, sehingga kaum pria yang cenderung memperoleh kesempatan lebih besar, sedangkan perempuan hanya dicadangkan pada urusan tradisional semata.¹⁶ Beneria (1979) menandai beberapa ciri-ciri khusus dari pekerjaan yang biasa ditekuni perempuan, yakni: (1) sesuai dan dapat dikombinasikan dengan kegiatan reproduksi dan khususnya kegiatan pemeliharaan anak, (2) pada posisi subordinat terhadap pekerjaan pria dan juga terhadap hubungan hirarkhi berdasarkan umur, dan (3) merupakan perpanjangan kegiatan perempuan di sektor domestik.¹⁷

16. Perempuan acapkali dijuluki sebagai kaum ibu, tidak hanya sebagai ibu biologis melainkan juga sebagai ibu sosial. Artinya, perempuan selain secara kodrati melahirkan anak, mereka pula yang harus memikul tugas pengasuhan anak baik secara psikologis maupun fisik; lihat, M. Djajadiningrat-Nieuwenhuis, "Ibuisim and Priyayization: Part to Power?" dalam E. Locher and A. Niehof (ed.), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions* (Dordrecht/Providence: Foris Publication, 1987); Susanto dkk. (ed.), *op.cit.*

17. Lihat, Louders Beneria (ed.), *Women and Development: The Sexual Division of Labour in Rural Societies* (New York: Praeger, 1982).

Tenaga Kerja Perempuan: Beberapa Temuan

Idealnya, tenaga kerja perempuan yang terlibat di sektor publik, selain harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai, mereka juga harus memperoleh upah yang layak dan tidak diskriminatif. Namun, akibat latar belakang pendidikan dan masih dominannya hegemoni nilai patriarkhi dalam masyarakat, tak pelak yang terjadi pada akhirnya adalah proses marginalisasi.¹⁸ Yang dimaksud marginalisasi di sini bukan sekadar terjadinya proses segregasi pembagian kerja antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh adalah semacam proses "pengucilan" tenaga kerja perempuan pada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak menjanjikan kelangsungan hidup yang stabil, yang upahnya rendah atau dinilai sebagai bidang yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Bagi tenaga kerja perempuan, tanpa bekal pendidikan atau keterampilan yang cukup, jelas mustahil mereka bisa terserap di sektor formal. Mereka pada umumnya tidak memenuhi syarat tingkat pendidikan minimum yang ditetapkan berbagai badan usaha formal.¹⁹ Dengan segala kelenturan, fleksibilitas, dan kemudahannya, keberadaan sektor informal, industri rumahan, dan sejenisnya bagi tenaga kerja perempuan terutama yang berasal dari golongan miskin adalah sangat strategis dan fungsional.

Studi yang dilakukan Susanti dkk. (1996) menemukan bahwa modal utama yang perlu

18. Allison Scott, "The Marginality of Women," dalam *Economic and Development* No. 2/1986, hal. 653-654. Scott menyatakan bahwa di dalam marginalisasi sesungguhnya terkandung empat dimensi, yaitu: (1) penyingkiran perempuan dari pekerjaan produktif, (2) pemusatan perempuan pada pinggiran pasar tenaga kerja, baik itu sektor informal mau pun sektor sekunder, (3) pemisahan perempuan pada sektor-sektor tertentu, dan (4) pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang diindikasikan oleh perbedaan upah serta ketidaksetaraan akses keuntungan dan fasilitas kerja, termasuk akses terhadap program-program pelatihan untuk pengembangan karier.

19. Lihat tulisan Aida Vitalaya S. Hubies, "Dilema Ekonomi Wanita Pedesaan," dalam Toety Herati Noerhadi (ed.), *Dinamika Wanita Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), hal. 152.

dipersiapkan tenaga kerja perempuan bila ingin bekerja dan mencari uang sendiri pada umumnya hanyalah kemauan untuk bekerja keras (43,7%). Ijazah, pendidikan formal, keterampilan khusus, kenal, dan modal usaha dalam banyak hal tidak dituntut mereka miliki. Di sektor tradisional, mekanisme rekrutmen tenaga kerja pada umumnya memang sangat longgar: siapa pun bisa terserap ke sana — asal mereka siap untuk bekerja keras.²⁰

TABEL 2. Persyaratan yang Diperlukan Tenaga Kerja Perempuan Agar dalam Bekerja di Sektor Publik (n = 300)

Persyaratan Kerja	Dituntut	Kurang Dituntut	Tidak Dituntut	Tidak Tahu	Jumlah
Pendidikan/Ijazah	27,7	7,0	25,7	39,6	100,0
Ketrampilan tertentu	18,7	18,0	24,3	39,0	100,0
Kenal	4,0	18,7	38,3	39,0	100,0
Kemauan bekerja keras	43,7	8,3	8,7	39,3	100,0
Modal alat	3,0	13,7	44,0	39,3	100,0

Bagi tenaga kerja perempuan fleksibilitas dan kesempatan mereka tetap dapat mengerjakan peran domestik adalah faktor utama yang menjadi daya tarik sektor tradisional. Besar upah, misalnya — kendati dibutuhkan — tetapi pada umumnya tidak menjadi prioritas nomor satu karena di luar itu kaum perempuan membutuhkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, rutinitas penghasilan, dan kesejahteraan keluarganya, khususnya kesejahteraan anak-anak. Di samping itu, acapkali terjadi kaum perempuan "pasrah" dengan upah yang rendah karena mereka merasa sekadar membantu suami atau karena sadar bahwa mereka

secara sosiologi memang belum berdaya.

Bekerja sebagai buruh industri di kota, bagi perempuan tertentu — terutama yang belum menikah atau yang sudah menikah tetapi sekaligus mengikuti suaminya migrasi di kota — barangkali dari segi penghasilan upah yang diperoleh lebih besar daripada bekerja sebagai buruh tani, sektor informal atau lebih besar dari penghasilan yang diperoleh jika mereka bekerja sebagai pedagang

kecil-kecilan. Namun demikian, banyak tenaga kerja perempuan menyatakan iklim kerja yang ketat seperti di dunia pabrik belum tentu sesuai bagi mereka.

Di mata tenaga kerja perempuan — khususnya yang bermukim di desa — konsep kesejahteraan pada umumnya tidak semata diukur dari

besarnya upah atau penghasilan, melainkan condong diukur dari segi keamanan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dari hasil wawancara mendalam, diketahui sebagian besar tenaga kerja perempuan menyatakan enggan terlibat dalam institusi kerja yang terlalu formal dan ketat. Di sektor tradisional, salah satu kelebihan yang disukai tenaga kerja perempuan adalah soal jam kerja yang selain tak terlalu lama, juga fleksibel. Berbeda dengan kerja pabrikan atau kerja kantor — di mana pekerja dituntut masuk kerja mulai pagi dan terkadang masih diimbui dengan kewajiban lembur — keberadaan sektor tradisional dinilai jauh lebih disukai karena tenaga kerja perempuan bisa agak bebas bekerja — yang penting beban dan tanggung jawab pekerjaan mereka terselesaikan.

Penelitian di tiga daerah (Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, dan Kotamadya Surabaya), menemukan hampir separuh jam kerja tenaga kerja perempuan berkisar antara 6—8 jam per hari. Temuan ini sedikit-banyak sama dengan hasil studi Sap-tandari dan Budiono mengenai keterlibatan perempuan di sektor industri kecil yang rata-rata per hari bekerja selama 5—7,5 jam. Dari

20: Lihat, Emy Susanti, Bagong Suyanto, dan Sutinah, *Community Support System Bagi Wanita Bekerja, Studi Tentang Peran Insititusi Sosial di Tingkat Keluarga, Kerabat dan Komunitas yang Mendukung Keterlibatan Wanita di Sektor Publik* (Kerjasama PSW Universitas Airlangga dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan BKKBN, 1996). Penulis di sini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Yaumul A. Achir yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi terselenggaranya kegiatan penelitian ini. Di samping itu, kepada teman-teman Program Studi Sosiologi yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data — Kamaji, Septi Ariadi, dan Sudarso — dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus.

TABEL 3. Pendapat Perempuan Tentang Upah, Fasilitas Kerja dan Kesetaraan Upah-Tenaga Kerja Pria dan Perempuan

Pendapat Responden	Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Sangat Tidak Memadai	Tidak Menjawab	Jumlah
Besar upah	3,3	30,3	13,3	13,7	0,0	39,3	100,0
Hubungan dengan majikan	2,0	29,7	14,7	14,0	0,3	39,3	100,0
Jaminan keamanan kerja	2,7	29,0	12,0	16,3	0,3	39,7	100,0
Fasilitas kesehatan	2,0	30,7	10,7	15,7	1,3	39,7	100,0
Waktu istirahat	2,0	33,0	13,0	12,3	0,3	39,3	100,0
Kesetaraan upah wanita-pria	1,3	30,7	14,7	13,3	0,7	39,3	100,0

300 responden, sekitar dua perlima mengaku rata-rata lama kerja mereka berkisar antara 9-11 jam per hari, dan hanya 4,7% responden yang lama jam kerjanya di atas 14 jam.²¹

Di mata ekonom yang serba rasional dan kalkulatif, cara kerja di sektor tradisional yang fleksibel dan lentur mungkin akan dipandang tidak efisien. Pengaturan kerja secara ketat dan mengelola usaha menurut hukum-hukum manajemen moderen yang serba rasional, secara teoritis harus diakui dalam banyak hal efektif untuk mendongkrak jumlah produksi. Namun, bila hal itu diterapkan dalam sektor tradisional yang selama ini banyak ditekuni tenaga kerja perempuan dari golongan masyarakat miskin, jangan heran bila akan menimbulkan perubahan dan perlakuan karena dinilai merepotkan. Pengaturan jam kerja yang ketat, tetapi kemudian tidak memungkinkan perempuan melakukan pekerjaan domestik yang dibebankan masyarakat kepadanya, jelas akan menjadi persoalan baru bagi perempuan.

Hubungan sosial antara tenaga kerja perempuan dengan majikan di sektor tradisional, dari hasil studi Susanti dkk. (1996), tidak menjadi masalah karena kebanyakan berpola patron-klien — di mana majikan memberikan perlindungan dan pekerjaan, sementara pekerja di sisi yang berseberangan memberikan loyalitas atau dukungan kepada patronnya.²² Banyak tenaga kerja perempuan

mengaku bila mereka membutuhkan bantuan dan meminjam uang kepada majikan mereka — tentu dengan janji akan segera mengembalikan — maka biasanya akan dikabulkan.

Sekitar sepertiga tenaga kerja perempuan mengaku di lingkungan tempat kerja mereka soal waktu istirahat dinilai sudah cukup. Dari keseluruhan tenaga kerja perempuan yang diteliti, hanya 12,3% menyatakan waktu istirahat mereka kurang memadai. Salah satu kelebihan sektor tradisional memang adalah fleksibilitas dan kelenturannya.

Apakah bisa disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang ditekuni perempuan selama ini sudah memadai, dan tak lagi perlu dipersoalkan? Apakah jawaban subyektif responden benar-benar mencerminkan kondisi obyektif yang sebenarnya?

Di daerah pantai Trenggalek, pekerjaan yang ditekuni wanita adalah di pemindangan ikan atau dalam istilah lokal disebut *ngreyeng*. Tidak seperti pekerjaan lain — seperti berdagang ikan di pasar atau membuka warung kecil-kecilan di siang hari — pekerjaan *ngreyeng* dilakukan tergantung datangnya ikan. Kalau ikan datang pada malam hari, maka pemindangan ikan dimulai pada malam hari pula, dan tak jarang pekerjaan pemindangan ini baru selesai setelah matahari mulai pelan-pelan bangun — sekitar jam 4-5 pagi. Secara fisik, pekerjaan pemindangan ikan ini jelas sangat berat, dari segi kesehatan kurang baik bagi tangan-tangan terbuka tenaga kerja perempuan, dan cenderung tidak sebanding dengan besar upah yang diterima. Untuk satu keranjang ikan pindang yang kemudian ditata ke dalam kurang-lebih 600 kotak bambu kecil, tenaga

21. Pingky Saptandari Wisjubroto dan Bambang Budiono, *Wanita, Kerajinan Bambu dan Masyarakat* (Yogyakarta: PPK UGM, 1994), hal. 49.

22. Lebih jelasnya tentang pengertian patron-klien ini bisa dibaca lebih lanjut dalam Keith Legg, *Tuan, Ham-ba dan Sabaya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal. 10.

kerja perempuan itu hanya menerima upah Rp 1.500.

Apakah beban kerja dan upah yang mereka terima sepadan? Banyak kaum perempuan yang bekerja *ngreyeng* ini menyatakan bahwa tak ada masalah karena kebiasaan memang sudah seperti itu. Padahal, kalau mau diperbandingkan dengan ketentuan besar upah minimum buruh, misalnya, jelas upah di sektor pemindaangan ini masih jauh dari layak. Tetapi, sekali lagi, karena yang dicari dan diperoleh tenaga kerja perempuan bukan sekadar upah, melainkan juga hubungan sosial antar sesama yang akrab, maka beban pekerjaan yang sebenarnya berat itu menjadi tak terlalu mengganggu. Temuan penelitian ini, sedikit-banyak sama dengan hasil studi Suyanto (1995) tentang daya resistensi kaum buruh industri di perkotaan yang menemukan bahwa beban kerja yang berat ternyata tak menimbulkan alienasi di kalangan buruh karena mereka menetralsirkannya dengan hubungan sosial yang akrab antar sesama buruh.²³

Secara keseluruhan, hasil penelitian itu memang agak berbeda dengan sinyalemen sebagian analisis Marxian yang menyatakan bahwa di kalangan tenaga kerja perempuan akan terjadi alienasi dan perasaan dieksploitasi karena lingkungan kerja yang menjejaskan, karena sebagian besar responden ternyata tak terlalu mempermasalahkan kondisi lingkungan, beban kerja dan besar upah mereka. Sebagian besar tenaga kerja perempuan yang diwawancarai menilai soal besar upah, hubungan dengan majikan, jaminan keamanan kerja, fasilitas kesehatan, waktu istirahat, kesetaraan upah antara tenaga kerja wanita dan pria secara relatif sudah memadai. Besar absolut upah (30,3%) dan perbedaan

besar upah antara wanita dan pria (30,7%) yang semula dikhawatirkan terjadi, ternyata tak menjadi masalah.

Dalam konteks ini, ada dua dugaan atau jawaban hipotetis yang bisa dikemukakan: kenapa tenaga kerja perempuan cenderung merasa tak terganggu dengan kondisi dan beban pekerjaannya? *Pertama*, karena secara psikologis tuntutan perempuan akan konsep kesejahteraan kerja memang tidak terlalu tinggi, sehingga merasa relatif sudah puas dengan fasilitas kerja yang selama ini mereka terima — kendati secara obyektif sebenarnya

hal itu belum layak. *Kedua*, karena konstruksi sosial tenaga kerja perempuan itu mengalami hegemoni. Tenaga kerja perempuan yang diteliti tak mempermasalahkan lingkungan kerja mereka karena kebiasaan yang terjadi bertahun-tahun memang sudah seperti itu, dan mereka memilih bersikap pasrah atas nasib mereka.

Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang rendah dan jarang bersinggungan dengan informasi-informasi kritis, memang sulit berharap tenaga kerja perempuan — khususnya yang bermukim di desa-desa — bisa bersikap reflektif mengevaluasi kondisi lingkungan kerjanya. Namun demikian, bukan berarti semua tenaga kerja perempuan bersikap apatis dan pesimis.

Kendati jumlahnya hanya sekitar 15%, namun jumlah ini paling-tidak memperlihatkan bahwa di kalangan tenaga kerja perempuan sebagian telah ada benih-benih sikap kritis (lihat Tabel 3). Dari 300 tenaga kerja perempuan yang diteliti, sekitar 15% responden bukan cuma mempersoalkan jaminan kesehatan, waktu istirahat, dan hubungan dengan majikan yang dinilai kurang memadai, tetapi juga menggugat persoalan besaran upah dan ketimpangan upah tenaga kerja pria dan perempuan yang dinilai tidak adil.

Apakah jumlah tenaga kerja perempuan yang mulai sadar dan berani mempersoalkan ketidakadilan di lingkungan kerja mereka ini

**Apakah
bisa disimpulkan
bahwa lingkungan
kerja yang ditekuni
perempuan
selama ini sudah
memadai, dan
tak lagi perlu
dipersoalkan?
Apakah jawaban
subyektif
responden
benar-benar
mencerminkan
kondisi obyektif
yang sebenarnya?**

23. Bagong Suyanto, *Intensitas dan Pola Pemogokan Kaum Buruh di Jawa Timur* (Jakarta: Toyota Foundation dan YIIS, 1995).

akan terus bertambah atau justru berkurang memang tidak dicoba dikaji dalam penelitian tersebut. Namun, bisa diduga bahwa bersamaan dengan proses perkembangan masyarakat dan meningkatnya kekuatan arus bawah akibat makin terbukanya jalur komunikasi sosial sampai ke desa-desa, tak mustahil jumlah tenaga kerja perempuan yang makin kritis akan terus bertambah. Sekitar lima atau sepuluh tahun lalu, misalnya, siapa bakal menduga buruh-buruh perempuan berani melakukan aksi unjuk rasa menentang rendahnya upah yang mereka terima. Tetapi, pada saat ini, aksi-aksi pemogokan buruh sebagian besar di antaranya buruh perempuan justru makin bertambah marak di berbagai tempat, dan bahkan menjadi salah satu kekuatan pro-demokrasi yang cukup strategis.²⁴

Komitmen Pemerintah

Usaha untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wanita harus diakui bukan merupakan hal yang mudah. Tantangan yang harus dihadapi bukan sekedar secara kultural masyarakat kita belum memiliki etos wirausaha yang kuat atau karena masyarakat masih gagap untuk beradaptasi terhadap perubahan peran perempuan. Namun, lebih dari itu yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah karena struktur sosial masyarakat tampaknya masih belum siap untuk itu.

Berbeda dengan negara maju — di mana gerakan feminisme dan keberdayaan perempuan relatif telah mapan — di Indonesia, usaha dan tantangan untuk memberdayakan kaum perempuan tak mustahil akan menem-

puh jalan yang lebih berat karena dua hal. *Pertama*, karena akar timbulnya subordinasi perempuan di Indonesia lebih mengakar dan bersifat kultural daripada akibat proses industrialisasi. *Kedua*, karena secara politis masih belum ada komitmen yang benar-benar serius dari pemerintah untuk memberdayakan perempuan.

Dalam GBHN telah disinggung bahwa perempuan adalah salah satu potensi pembangunan yang harus dimanfaatkan dan dihargai sesuai dengan hak asasi sebagai manusia. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dalam berbagai aspek kehidupan masih berlangsung pelecehan dan subordinasi kaum perempuan. Banyak program pembangunan ditengarai disusun dan dilaksanakan tanpa dilandasi dengan kepekaan *gender* (*gender sensitive*). Di samping itu, para pelaksana kebijakan di berbagai daerah pun masih banyak yang belum memiliki visi *gender* yang jelas, sehingga acapkali terjadi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan salah arah.

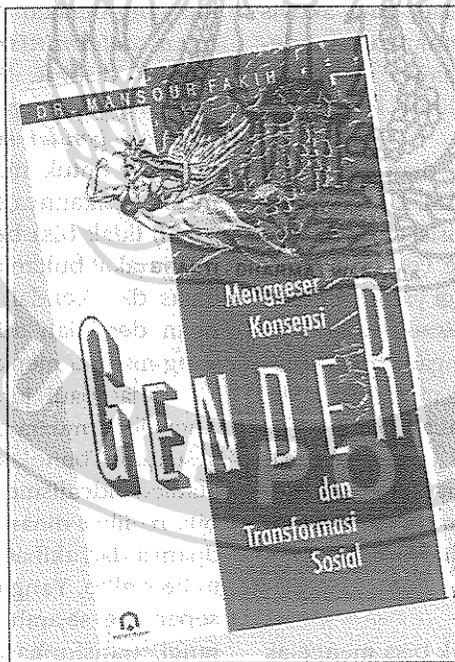
Diakui atau tidak, program-program pembangunan yang ditujukan bagi kaum perempuan di Indonesia sedikit-banyak masih tetap berkutat dalam kegiatan sektor domestik dan peran perempuan seringkali juga masih dipahami sebagai sekedar pelengkap karir. Kegiatan pembangunan yang benar-benar berusaha memberdayakan kaum perempuan cenderung belum tersentuh. Bahkan, dalam banyak kasus, kaum perempuan sering dilihat sebagai beban daripada diperlakukan sebagai kekuatan potensial pembangunan.

Untuk mengubah nasib kaum perempuan dari kungkungan nilai patriarkhi dan ketidakberdayaannya memang bukan usaha yang mudah seperti orang membalik telapak tangan. Tanpa didukung oleh komitmen pemerintah yang benar-benar serius, niscaya cita-cita untuk membangun masyarakat tanpa ketimpangan *gender* (*genderless society*) tetap akan menjadi slogan kosong yang sama sekali tidak berarti. ●

24. Tulisan tentang seluk-beluk kehidupan buruh perempuan bisa dibaca pada beberapa hasil penelitian AKATIGA, Pusat Analisis Sosial, antara lain: Indraswari dan Juni Thamrin, *Potret Kerja Buruh Perempuan: Tinjauan Pada Agroindustri Tembakau Ekspor di Jember* (Bandung: AKATIGA, 1994); Ema Ermawati Chotim, *Subkontrak dan Implikasinya Terhadap Pekerja Perempuan, Kasus Industri Kecil Batik Pekalongan* (Bandung: AKATIGA, 1994).

Analisis Gender untuk Transformasi Sosial

Dr. Mansour Fakh
*Menggeser Konsepsi Gender dan
 Transformasi Sosial*
 Pustaka Pelajar - Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1996.
 xxvii + 208 halaman.



Sepatutnya setiap penerbitan buku mengenai feminisme disambut gembira, mengingat sangat sedikit bacaan jenis ini dalam bahasa Indonesia, lebih-lebih ditulis oleh orang Indonesia. Ingatan publik masih mengenang buku Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, (1989) yang segera akan menjadi klasik, selebihnya karya terjemahan para feminis dari Mesir, Pakistan, India seperti Fatima Mernisi, Rifaat Hasan, Khamla Bhasin & Nighat S. Khan dan lainnya. Seandainya ada, itu pun masih berupa artikel

dalam jurnal, baik makalah lepas maupun artikel opini di koran. Artefak-artefak ini memantulkan keingintahuan masyarakat terhadap feminisme dan gerakan perempuan. Di sisi lain kedua masalah itu memang relevan secara sosial. Sehingga buku yang ditulis Dr.

Mansour Fakh agaknya mengisi kekosongan itu.

Bukan serpihan perubahan yang mau diusulkan buku ini, melainkan transformasi sosial secara mendasar dan menyeluruh demi penciptaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga terasa sekali nuansa sosial doktor lulusan *University of Massachusetts Amherst* yang cenderung bersifat "radikal".

Analisis Gender

Realitas sosial justru memapras pengertian gender yang identik dengan pemaknaan seks.

Akibatnya pemaksaan suatu peran feminin-maskulin tertentu mendera masing-masing jenis kelamin. Kenyataan seperti ini tidak saja memojokkan kaum perempuan, tetapi juga laki-laki. Karena keduanya sama-sama menghadapi struktur sosial yang tidak adil. Maka

demikianlah, angan-angan sosial menuju terbentuknya sebuah dunia yang menempatkan penentuan diri (*self determination*) terbuka bagi setiap individu tanpa memandang apakah dia seorang laki-laki atau pun perempuan menguap.

Perjuangan Gerakan Perempuan

Feminisme bukanlah gerakan homogen. Ada banyak varian. Bisa dipilih yang ber-sumber dari paradigma *mainstream* (feminisme liberal) dan dari paradigma konflik (feminisme radikal, marxis dan sosialis). Perbedaan paradigma ternyata cukup mewarnai suatu varian gerakan feminisme. Menjadi jelas bila kita mencek corak pemaknaan, konsepsi, asumsi, bidang-bidang ideologi, praktek hubungan antara laki-laki dan perempuan sampai implikasinya ke bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya secara lebih luas. Kerap kali potensi ini menjadi medan konflik internal bagi kalangan feminis sendiri. Tanpa melihat akar keterbelakangan secara berbeda, lebih dari itu Mansour menilai, para aktivis umumnya tidak ingin melanjutkan perdebatan teoritik tersebut dan hanya menerima kebenaran tunggal dari aliran feminisme tertentu (*hal. 97, 186*).

Solusi yang kemudian diajukan oleh Country Representatif OXFAM UK ini, *pertama*, merekomendasikan posisi teoritik yang bisa mengatasi determinisme (*overdeterminisme*) yaitu suatu epistemologi yang menolak penyebab tunggal (*esenstalisme*) yang juga berarti tidak mengabaikan pengaruh-pengaruh lain (*reduksionisme*), *kedua*, menggagas visi feminisme masa depan yang akan kerap saling meminjam analisis dan teori (*hal. 186*). Barangkali tidak begitu mengherankan jika buku kecil ini menyinggung beberapa nama besar dari Adam Smith hingga Michael Foucault.

Catatan Kecil

Tampaknya buku ini tidak bisa mengelak dari kekurangan. Untuk itu begitu banyak kesalahan cetak yang cukup mengganggu dan penjelasan yang tumpang tindih. Pembaca sering dipaksa kembali membuka persoalan yang sudah diuraikan pada halaman-halaman sebelumnya. Sayang pengulangan ini tidak diikuti pendalaman bahasan, bahkan masih

menggunakan kalimat yang hampir persis.

Memasukkan Antonio Gramsci dalam kalangan penganut *Critical Theory*-nya Mazhab Frankfurt (*hal. 35*) sangat tidak bisa diterima oleh teori sosial manapun. Karena meski sama-sama menolak materialisme vulgar, karya Gramsci, *Prison Notebooks*, yang kini menjadi literatur penting teori politik, muncul, sebelum penyusunan karya tokoh-tokoh Mazhab Frankfurt yang memproduksi teori kritis masyarakat.

Selain itu terasa berlebihan menilai pengiriman calon-calon teknokrat dan para pemimpin mahasiswa dari "dunia ketiga" bertujuan untuk menyebarkan ideologi developmentalisme (*hal. 48; 135*). Bukankah pendidikan di Amerika Serikat juga menghasilkan pengkritik tangguh developmentalisme seperti Arief Budiman serta masih banyak yang lain bahkan Mansour Fakih sendiri?

Kritik buku ini atas feminisme yang mengusung paradigma *mainstream* kurang proporsional; sebaliknya cacat umum feminisme yang berakar dari paradigma konflik dengan *determinisme strukturalnya* belum banyak disorot. Menempatkan sistem atau masyarakat sebagai kambing hitam ketidaksetaraan *gender* serta mengecilkan potensi individu untuk mengubah keadaan bahkan memosisikannya sebagai korban pasif penindasan tidak bisa begitu saja diterima. Karena masyarakat bukanlah suatu yang sepenuhnya lepas dari kendali anggota-anggotanya. Dengan demikian ada andil individu-individu yang mampu mengubah lingkungannya.

Melampaui jurang perdebatan yang seringkali bermuara pada debat filosofis apakah sesuatu itu bertolak dari materialisme filosofis ataukah idealisme filosofis? Lebih produktif bila melihat dinamika yang timbul antar keduanya dan akibat yang dibawanya dari waktu ke waktu. Yang pokok ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan harus diperangi, transformasi sosial berkeadilan terus menerus diperjuangkan.

Di atas semua tinjauan ini, ada relevansi sosial dan intelektual dari buku ini, lebih-lebih bagi pembaca yang belum akrab dengan wacana feminisme. ●

Dj. T. Susila,

aktif di kelompok Studi Bebas Sekolah, Yogyakarta.